

RINGKASAN

PROSES PEMBAYARAN UANG LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PLATFORM PRMBAYARAN PEMERINTAH (PPP) PADA KPPN SEMARANG I, Heny Inayatul Maula, NIM D42201123, Tahun 2024, 112 hlm, Akuntansi Sektor Publik, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Teguh Widodo (*Person in charge*) dan Endro Sugiartono, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Magang). Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilakukan selama magang berlangsung dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak). Adapun tujuan khusus dari laporan ini adalah dapat meningkatkan keterampilan peran dalam melaksanakan “Proses Pembayaran Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil Melalui Platform Pembayaran Pemerintah Pada KPPN Semarang 1”.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan pelayanan kepada satuan kerja. Pelaksanaan magang ini dilaksanakan selama 800 jam, yang dimulai sejak tanggal 01 September 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 dengan 5 hari kerja yaitu Senin-Jumat. Kegiatan magang ini dapat meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh Sub bagian Umum dan 4 seksi pada KPPN Semarang 1 adanya saling keterkaitan antar seksi dalam hal tugas teknis yang berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi dan prosedur masing-masing seksi sehingga aktivitas di KPPN Semarang 1 dapat saling sinergi dalam menjalankan tugas, adanya Sub bagian Umum yang menjadi *supproting* dalam memenuhi berbagai kebutuhan untuk sinergitas mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Salah satu peran dari Subbagian umum yaitu adanya peran dalam pengelolaan administrasi dan belanja pegawai, dapat diperoleh kesimpulan bahwa KPPN Semarang I dalam melaksanakan pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023.

KPPN Semarang I dalam melaksanakan pembayaran uang lembur PNS telah dilakukan sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dari pusat, namun dalam proses pengelolaan daftar lembur PNS belum terlaksana secara efektif masih terdapat penyetoran SPTPL saat selesai melaksanakan lembur hal tersebut kurang efektif karena pihak PPABP melakukan sinkronisasi ulanh lewat aplikasi SILAP, pendataan pegawai yang akan melaksanakan lembur dilakukan secara manual setiap harinya. Untuk itu perlu adanya inovasi dalam perekapan data yang akan melaksanakan lembur, seperti pembuatan *gform* atau sistem khusus untuk rekap data harian pegawai yang melaksanakan lembur, sehingga dapat terciptanya sinergitas dalam sebuah organisasi.